



Vol. 9 No. 1, Juni 2025

Jurnal HISTORICA

E-ISSN: 2964-9269

ISSN: 2252-4673



Publisher:
History Education Study Program
University of Jember



INTENSIFICATION OF PEOPLE'S SUGARCANE PROGRAM IN JEMBER REGENCY 1975-1998

Novelia Putri Ika Ifana^{1*}, Akhmad Ryan Pratama², Robit Nurul Jamil³, Mohamad Na'im⁴, Gusti Ngurah Ary Kesuma Puja⁵, Kayan Swastika⁶

^{1,2,3,4,5,6}Pendidikan Sejarah, Universitas Jember, Indonesia

*Corresponding author : noveliaptrikifn@gmail.com

Informasi artikel: Diterima: 30 April 2025; Revisi: 5 Mei 2025; Disetujui: 28 Mei 2025; Diterbitkan: 16 Juni 2025

ABSTRAK

Program Intensifikasi Tebu Rakyat (TRI) adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Orde Baru melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1975 yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani tebu. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pelaksanaan Program Intensifikasi Tebu Rakyat (TRI) di Kabupaten Jember pada tahun 1975-1998. Metode penelitian ini menggunakan metode sejarah, dengan teknik pengumpulan sumber melalui studi literatur dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Jember memenuhi kriteria untuk menjadi daerah sasaran TRI karena memiliki kondisi geografis dan sosial yang sesuai. Pelaksanaan program TRI di Kabupaten Jember sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengawas Bimas No. 011/SK/MENTAN/BPB/3/1976. Dampak dari program TRI ada pada sektor sosial seperti peningkatan solidaritas petani, dan dampak pada sektor ekonomi seperti peningkatan pendapatan petani dan jumlah produksi tebu di seluruh wilayah Jember.

Kata kunci: Kebijakan Politik; Kabupaten Jember; Intensifikasi Tebu Rakyat (TRI).

PENDAHULUAN

Gula adalah salah satu komoditas ekspor yang sangat berpengaruh terhadap sektor perekonomian sejak zaman kolonial. Hal ini disebabkan oleh banyaknya permintaan komoditas gula ditingkat pasar internasional sehingga sangat berdampak terhadap kenaikan jumlah pemasukan bagi pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena itu, untuk menunjang keberlangsungan industri gula tersebut akhirnya pemerintah kolonial mulai mendirikan pabrik-pabrik gula yang digunakan sebagai tempat untuk mengolah tebu sebagai bahan baku pembuatan gula dalam skala besar (Safitri, 2018).

Tanaman tebu dapat berkembang dengan sangat baik di Indonesia karena wilayahnya yang beriklim tropis. Tebu mulai ada di Indonesia sejak abad ke-15 yang diperkenalkan oleh

DOI: <https://doi.org/10.19184/jhis.v9i1.53695>

Copyright@Jurnal Historica. This is an open access article under the CC-BY-SA license

imigran dari Cina. Pada awalnya, pembudidayaan tanaman tebu yang dilakukan oleh para imigran Cina berada di sekitar wilayah Batavia, produksi gula dalam hal ini hanya diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan konsumsi gula kalangan orang-orang Belanda saja (Tanama, 2017).

Industri gula di Indonesia pernah berada di puncak kejayaan tepatnya pada tahun 1928, hingga kemudian menjadikan Indonesia sebagai negara eksportir gula terbesar peringkat nomor dua setelah Kuba (Hasan & Masyhuri, 2017). Jumlah industri gula yang dimiliki oleh Indonesia pernah mencapai 179 pabrik yang menyebar di wilayah Jawa dan Sumatera. Adapun jumlah produksi gula tertinggi yang pernah dihasilkan oleh industri-industri gula di Indonesia pada tahun 1928 yakni sebesar 2,95 juta ton (Masluchah, 2014).

Industri gula setelah tahun 1929 secara perlahan mulai mengalami penurunan yang diakibatkan oleh terjadinya krisis malaise yang berdampak terhadap merosotnya harga dan penurunan jumlah penjualan komoditi pada semua sektor, termasuk komoditi gula. Selain itu, industri gula yang ada di Indonesia juga menghadapi berbagai permasalahan-permasalahan internal yang serius antara lain seperti jumlah produksi dan produktivitas gula nasional yang menurun drastis sementara permintaan gula semakin meningkat yang diakibatkan oleh kenaikan jumlah penduduk dan penghasilan masyarakat. Akibatnya, untuk dapat memenuhi konsumsi gula nasional Indonesia telah mengimpor gula sejak tahun 1967 (Aji, 2022).

Ketidakmampuan produksi gula dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri, sehingga upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut salah satunya membuat kebijakan tentang prosedur komponen produksi gula memiliki keterkaitan erat dengan pertumbuhan industri gula di Indonesia. Seiring berjalannya waktu upaya dalam meningkatkan produktivitas gula sedikit demi sedikit terlaksana karena didorong oleh terjadinya peningkatan jumlah tebu rakyat yang digiling pada pabrik gula (Masluchah, 2014).

Perubahan sistem kebijakan terjadi pada pengolahan tebu rakyat yang awalnya memakai sistem sewa tanah kemudian diubah sejak tahun 1960 karena diakibatkan oleh tingginya angka inflasi mengakibatkan sistem sewa tanah diganti dengan sistem bagi hasil yang melibatkan pihak pabrik dan golongan petani. Sesudah kondisi mulai pulih dan membaik kebijakan bagi hasil diubah kembali menjadi sistem sewa tanah. Namun, seiring kebijakan sewa tanah berjalan petani tebu yang pada saat itu menyewakan kembali lahannya mengalami penghasilan yang tidak kunjung membaik bahkan semakin rugi. Ketidakstabilan pendapatan petani tebu inilah yang kemudian menyebabkan kebijakan sistem sewa tanah tidak bertahan begitu lama, karena pemerintah mencoba menerapkan sistem pengelolaan tebu yang baru (Safitri, 2018).

Penerapan sistem pengelolaan tebu yang baru dapat direalisasikan oleh pemerintah Indonesia pada 22 April 1975 yakni melalui pengesahan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Program Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI). Hal ini menandai adanya sebuah perubahan pembaharuan terhadap sistem perindustrian gula sekaligus sebagai salah satu usaha dalam rangka untuk mengatasi permasalahan gula nasional (Hamid, 1994).

Luas areal penanaman tebu terus mengalami peningkatan sejak terbitnya Inpres No. 9 Tahun 1975 tentang Tebu Rakyat Intensifikasi. Kenaikan luas areal tebu selama periode 1975-1980 mencapai 80,17% yaitu meningkat dari yang awalnya hanya 104.777 Ha menjadi 188.772 Ha. Kenaikan ini tidak hanya terjadi pada luas areal saja, melainkan juga pada hasil produksi gula yang meningkat sebesar 20,68% yaitu berkembang dari 1.035.000 ton menjadi 1.249.000 ton (Masluchah, 2014).

Pelaksanaan program TRI di Jawa dilakukan dengan berkala serta diatur oleh berbagai instansi pemerintah pusat sampai pemerintah daerah setempat. Jawa Timur menjadi salah satu

dari sejumlah wilayah yang menjadi sasaran dalam penerapan program ini, salah satunya adalah perkebunan tebu di Kabupaten Jember. Pelaksanaan Program TRI di Kabupaten Jember tidak dilakukan pada semua kawasan melainkan hanya terfokus pada 14 wilayah saja dengan sebagian besar berada di Jember bagian selatan, salah satu kawasan di Jember selatan yang mengikuti program TRI adalah Kecamatan Kencong. Pertimbangan yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II mengenai kawasan Jember Selatan yang dipilih menjadi sasaran dalam pelaksanaan Program TRI ini yaitu berlandaskan pada data yang memuat potensi lahan pertanian, jumlah petani, serta jumlah kepala keluarga yang memadai (UPP TRI Jember II, 1983).

Tujuan dari tulisan ini adalah: (1) mengetahui dan mengkaji latar belakang program Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) di Kabupaten Jember Tahun 1975-1998; (2) mengetahui dan mengkaji pelaksanaan Program Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) di Kabupaten Jember 1975-1998; (3) mengetahui dan mengkaji pengaruh dari implementasi Program Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) terhadap kehidupan sosial dan ekonomi petani tebu di Kabupaten Jember. Manfaat penelitian: (1) diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya pada sektor industri gula seperti Program Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan para petani tebu khususnya bagi masyarakat Kabupaten Jember yang ditinjau dari segi sejarah ekonomi lokal; (2) diharapkan dapat memberikan kontribusi bahan literatur terkait kajian sejarah ekonomi, sejarah agraria dan sejarah lokal bagi pembelajaran sejarah khususnya tentang salah satu kebijakan pemerintahan Orde Baru; (3) diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan sebuah kebijakan tentang industri gula untuk mengatasi tantangan dalam sistem produksi dan pemasaran tebu.

Ruang lingkup tulisan ini meliputi, ruang lingkup temporal, spasial, dan materi. Ruang lingkup temporal yang digunakan yaitu tahun 1975 digunakan sebagai awal penelitian karena dilatar belakangi oleh dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1975 tentang Tebu Rakyat Intensifikasi. Sedangkan tahun 1998 digunakan sebagai batas akhir dari penelitian ini karena pada tahun tersebut pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1998 yang sekaligus menandai berakhirnya pemberlakuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1975 tentang Tebu Rakyat Intensifikasi. Ruang lingkup spasial memfokuskan di wilayah Kabupaten Jember tepatnya di Kecamatan Kencong, latar belakang pemilihan Kecamatan Kencong digunakan sebagai batasan spasial karena wilayah ini merupakan salah satu wilayah sasaran TRI. Ruang lingkup materi yang akan disajikan dalam penulisan ini yaitu yang pertama, memuat tentang latar belakang Program TRI di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, pelaksanaan Program TRI di Kabupaten Jember dan pengaruh yang ditimbulkan oleh pelaksanaan Program TRI terhadap kehidupan petani di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah melalui tahapan: (1) pemilihan topik; (2) heuristik; (3) kritik; (4) interpretasi; (5) historiografi agar menjadi tulisan yang baik sesuai kaidah ilmiah yang berlaku. . Penentuan topik pada penelitian ini bersumber dari adanya kedekatan emosional, yang mempunyai sifat subjektif. Disebut subjektif karena pada penentuan memilih topik disesuaikan dengan tema yang penulis senangi, hal ini menjadi sangat penting karena dengan pertimbangan akan memudahkan penulis dalam melaksanakan penelitian apabila tema kajiannya sesuai dengan yang disenangi. Adapun tema dari penyusunan skripsi ini adalah mengangkat sejarah perkebunan, kajiannya terkait sosial-ekonomi. Menurut

peneliti, tema ini sangat relevan dengan permasalahan yang akan diteliti karena bahasan yang akan dikaji yaitu terkait kehadiran perkebunan yang memberikan pengaruh besar terhadap kondisi kehidupan masyarakat sekitarnya.

Pada pengumpulan sumber atau heuristik, terkait topik Program TRI di Kabupaten Jember Tahun 1975-1998 pada mulanya mendapatkan informasi dari sumber lisan dengan beberapa narasumber petani tebu peserta TRI. Selanjutnya peneliti mencari informasi di beberapa instansi pemerintahan seperti di Arsip Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Nasional dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur yang memuat berbagai arsip mengenai program TRI seperti SK, Inpres maupun arsip foto sezaman.

Tahap kritik sumber atau verifikasi. Berdasarkan sumber-sumber yang telah ada peneliti melakukan kritik sumber secara eksternal maupun internal. Hal ini dilakukan dengan tujuan memperoleh data-data relevan dan kredibel untuk menuliskannya menjadi sebuah tulisan sejarah yang baik. Seperti yang dilakukan pada salah satu sumber, yaitu Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Inventaris Arsip Kementerian Pertanian RI (1948) 1950-2009, Nomor Klasifikasi 1148, Laporan Bulanan Tebu Rakyat Intensifikasi Tahun 1980/1981 Provinsi Jawa Timur. Di dalamnya menjelaskan tentang laporan bulanan tebu rakyat intensifikasi tahun 1980/1981 yang berisi tentang realisasi tanah TRI tahun 1980/1981, ralisasi penyaluran sarana produksi dan kredit tahun 1980/1981 dan masalah-masalah yang mempengaruhi pelaksanaan tebu rakyat intensifikasi.

Tahap interpretasi data. Tahap interpretasi ada dua, yaitu analisis dan sintesis yang memiliki tujuan agar fakta-fakta sejarah dapat terungkap jelas sehingga menjadi rangkaian cerita sejarah. Tahap analisis dilakukan dengan cara menganalisis fakta berdasarkan pada sumber-sumber yang telah dikritik sebelumnya. Kemudian dilakukan dengan tahapan sintesis dengan cara peneliti menafsirkan serta merangkai fakta yang diperoleh secara kronologi secara kesatuan yang terstruktur, logis, rasional dan faktual.

Tahap historiografi yaitu tahapan ini menuntut peneliti untuk menuliskan kembali tentang data-data yang telah diperoleh sebelumnya secara kronologis untuk mendapatkan sebuah gambaran yang jelas terkait awal hingga akhir dalam proses penelitian ini.

HASIL

Latar Belakang Program Tebu Rakyat Intensifikasi

Pemberlakuan program TRI pada 22 April 1975 melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 merupakan langkah yang diambil pemerintah untuk menangani berbagai permasalahan industri gula nasional. Permasalahan-permasalahan tersebut berkaitan dengan persoalan persewaan tanah dan penyediaan areal, ketersediaan areal untuk PG seiring bertambahnya waktu cenderung mengalami penyempitan karena disebabkan oleh perluasan areal pemukiman akibat terjadinya peningkatan penduduk yang semakin pesat. Hal inilah kemudian berdampak terhadap harga nilai tanah yang semakin mahal dan diikuti juga dengan kenaikan harga sewa tanah untuk perkebunan tebu. Permasalahan selanjutnya yaitu terdapat adanya persaingan areal penanaman tebu dengan komoditi lain terutama tanaman pangan. Penurunan produksi gula di Indonesia diperparah sejak terjadinya krisis ekonomi dunia (*malaise*) sekitar tahun 1930, dan pecahnya perang dunia kedua sekitar tahun 1941-1945 (Fauzi, 2014).

Program TRI merupakan salah satu usaha penting yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada waktu itu untuk mengatasi masalah produksi gula nasional akibat lonjakan penduduk yang semakin meningkat. Pada tahun 1980 Indonesia pernah mengalami kekurangan pemenuhan kebutuhan konsumsi gula masyarakatnya, yang diakibatkan oleh lonjakan jumlah

penduduk yang mencapai 147 juta jiwa sehingga rata-rata kebutuhan konsumsi gula penduduk Indonesia sebesar 12 kg per kapita per tahun. Pemerintah Indonesia kemudian mengimpor gula dari luar negeri sebanyak 500 ribu ton untuk memenuhi kebutuhan konsumsi gula masyarakat pada tahun 1980 (Mubyarto, 1982).

Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut dengan melakukan intensifikasi, ekstensifikasi tanaman tebu dan penambahan masa giling bagi setiap pabrik gula. Berbagai kebijakan tersebut diharapkan nantinya akan menjadikan Indonesia mampu untuk melakukan swasembada gula sendiri dan dapat kembali menjadi salah satu negara pengekspor gula dunia. Kemunculan program ini menandai mulainya tahapan baru dalam pengembangan tebu rakyat serta perubahan sistem pengusahaan dari yang awalnya sistem sewa tanah untuk menanam tebu oleh perusahaan besar beralih menjadi tanaman tebu rakyat.

Tujuan Tebu Rakyat Intensifikasi

Penetapan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1975 tentang Program Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) yang dilakukan secara radikal oleh Pemerintah Indonesia menandai terjadinya perubahan struktur industri gula nasional yang berfungsi untuk meningkatkan produktivitas gula. Pemerintah berusaha untuk membatasi ketergantungan sistem produksi terhadap pabrik gula dengan mengalihkannya kepada petani yang berperan penuh terhadap proses produksi mulai dari penanaman hingga pemanenan tebu (Dwianto, 2014).

Dalam pelaksanaan Program TRI terbagi menjadi dua kategori berdasarkan lokasi pengelolaannya yaitu TRI Sawah (TRIS) yang diselenggarakan di lahan sawah dengan irigasi yang baik dan TRI Tegalan (TRIT) dilaksanakan pada lahan kering. TRIS dan TRIT kemudian dikategorikan lagi menurut tingkat pengeprasannya (penebangannya). Tebu yang ditanam di lahan sawah umumnya hanya dikepras sebanyak dua kali (TRIS I dan II), sementara untuk penanaman tebu yang berada pada lahan tegalan dapat dikepras hingga tiga kali (TRIT I, II, III) (Dwianto, 2014).

Tujuan pokok yang ingin diraih oleh pemerintah Indonesia melalui pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1975 tentang Program Tebu Rakyat Intensifikasi, yaitu:

- a) Menambah dan menstabilkan pengusahaan tebu dan produksi gula nasional;
- b) Meningkatkan kesejahteraan hidup petani dengan menaikkan penghasilan para petani tebu;
- c) Mengganti aturan terkait sistem pengusahaan tanaman tebu untuk produksi gula yang awalnya menggunakan sistem sewa tanah kemudian diubah menjadi pengelolaan tanaman tebu oleh petani dilakukan di atas tanahnya sendiri.

Kondisi Geografis

Kabupaten Jember adalah salah satu bagian dari 38 kabupaten/kota yang termasuk ke dalam wilayah provinsi Jawa Timur. Lokasi Kabupaten Jember terletak pada daerah perbukitan dan berada di sekitar beberapa lereng pegunungan, seperti pegunungan Hyang, gunung Raung dan gunung Argopuro yang membentang ke sisi selatan mencapai Samudera Hindia. Ketinggian wilayah Kabupaten Jember berkisar dari 0-3.300 meter di atas permukaan laut (mdpl). Kabupaten Jember beriklim tropis dengan suhu rata-rata sekitar 23°C – 32°C (Selayang Pandang Kabupaten Jember).

Berdasarkan kondisi geografis yang dimiliki oleh Kabupaten Jember tersebut, menyebabkan daerah ini sangat cocok untuk digunakan menjadi daerah pembudidaya tanaman perkebunan kualitas ekspor seperti kopi, kakao, karet, tembakau dan tebu. Tebu (*Saccharum officinarum* L.) merupakan bahan utama dalam produksi gula, tanaman ini dapat tumbuh

dengan optimal apabila dibudidaya pada kawasan yang beriklim tropis dengan suhu 24-30 °C sehingga hal ini sangat sesuai dengan kondisi geografis di Kabupaten Jember (Winarni et al., 2021).

Kondisi Sosial

Ditinjau dari sejarahnya pertumbuhan Kabupaten Jember sangat berkaitan dengan perkembangan sistem perkebunan partikelir yang bercorak kapitalis sehingga kemudian membawa perubahan sosial dan ekonomi pada masyarakat di sekitarnya. Sistem perkebunan swasta yang masuk di wilayah Jember ini nantinya akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan kabupaten Jember serta kemunculan masyarakat perkebunan.

Perkebunan swasta di wilayah Jember semakin berkembang pesat karena salah satunya didukung oleh terjadinya migrasi penduduk. Keterkaitan yang sangat erat antara perkembangan perkebunan swasta dengan kehidupan masyarakat ini pada akhirnya melahirkan sebuah kondisi sosial baru yang identik dengan sebutan masyarakat perkebunan di Jember. Definisi dari masyarakat perkebunan adalah sekelompok masyarakat yang menggantungkan mata pencahariannya terhadap sektor pertanian baik sebagai buruh, pengelola ataupun pemilik. Masyarakat ini memiliki karakteristik yaitu menggantungkan penghasilan utamanya pada komoditas tanaman perkebunan seperti tembakau, kopi, karet, kakao, tebu dan lain sebagainya dalam jumlah besar yang diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik hingga ekspor (Aprianto, 2016).

Kondisi sosial Kabupaten Jember apabila dilihat berdasarkan sensus penduduk pada tahun 1981 ditemukan bahwa jumlah penduduknya telah mencapai sekitar 1.881.663 jiwa. Melihat kondisi sosial yang di miliki oleh Kabupaten Jember baik dari sisi sejarahnya yang panjang sehingga membentuk sebuah kondisi sosial yang identik dengan sebutan masyarakat perkebunan yang menggantungkan penghasilan utamanya pada komoditas tanaman perkebunan seperti tembakau, kopi, karet, kakao, tebu, menjadikan kawasan ini layak untuk berpartisipasi dalam program TRI.

Kondisi Perkebunan Tebu di Kabupaten Jember Sebelum TRI

Kemunculan perkebunan tebu di wilayah Jember terjadi pada dekade kedua abad ke-20, apabila dibandingkan dengan kawasan Residen Besuki lainnya daerah Jember menjadi tempat yang paling lambat terkait perkembangan industri gula. Pada tahun 1920 pemilik industri gula Jatiroto yaitu Handelsvereeniging Amasterdam (HVA) melakukan perluasan area budidaya perkebunan tebu di Jember, yang sekaligus menandai awal mula masuknya industri gula di wilayah ini (Nawiyanto, 2018).

Pada tahun-tahun berikutnya HVA terus mengusahakan untuk semakin memperluas area budidaya tebunya dengan mengajukan permohonan menyewa lahan di Kencong dan Bondoyudo dengan luas 3.500 *bau*. Seiring dengan kemudahan dalam pengajuan menyewa tanah di Jember, kemudian mendorong HVA untuk mengajukan pembangunan pabrik gula baru di kawasan Jember. Usulan tersebut kemudian disetujui oleh pemerintah, sehingga dalam kurun waktu 1925 – 1928 tercatat terdapat tiga pabrik gula baru yang mulai beroperasi dan menggiling tebu di daerah ini. Tiga pabrik gula tersebut yaitu, Pabrik Gula Gunungsari di Kecamatan Kencong, Pabrik Gula Bedadung di Kecamatan Balung dan Pabrik Gula Semboro di Kecamatan Tanggul

Sebelum berlangsungnya program TRI pengusaha tanaman tebu banyak diusahakan oleh para petani terutama bagi mereka yang lahannya tegalan. Sebagaimana yang dilakukan

oleh banyak petani di daerah Jawa Timur yang merupakan pusat penanaman tebu. Kondisi petani tebu sebelum adanya TRI bersumber dari usaha tani tebu yang sangat ditentukan oleh tingkat produktivitas yang dipengaruhi oleh jenis dan kesuburan tanah, penerapan teknis budidaya, pola pergiliran tanaman dan keterampilan petani dalam mengelola usaha taninya. Selain itu adanya ketentuan bagi hasil antara pabrik gula dengan petani tebu maka pendapatan petani tebu tergantung pula dari besarnya bagian yang diterima petani dan harga gula. Namun kedua faktor tersebut merupakan faktor yang berada di luar kekuasaan petani untuk menentukan karena hal tersebut diatur oleh pemerintah (Mubyarto dan Daryanti, 1991).

Pelaksanaan Program Tebu Rakyat Intensifikasi di Kabupaten Jember Tahun 1975-1998

Pelaksanaan program TRI secara nasional dilaksanakan setelah adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Program Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) yang dikeluarkan pada 22 April 1975. Terdapat beberapa tujuan utama yang ingin dicapai dari pemberlakuan Program TRI adalah mengalihkan pengusahaan tebu yang semula berada di tangan pabrik gula dengan sistem sewa ke tangan petani yang harus mengusahakan sendiri tanaman tebu di atas lahannya, memperbaiki penghasilan petani tebu dengan meningkatkan produktivitas melalui pengelolaan usaha tani yang lebih intensif, serta menjamin peningkatan dan kemandirian produksi gula (Dwianto, 2014).

Berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program TRI memiliki fungsi masing-masing mulai dari nasional hingga lokal. Pola pengusahaan TRI yaitu dilaksanakan dalam sebuah forum dengan memfokuskan pada intensifikasi tanaman pangan, sehingga memerlukan adanya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi agar dapat mengendalikan dan membina program tersebut. Bersumber dari hal tersebut Presiden memberikan tanggung jawab kepada Badan Pengendali BIMAS tingkat pusat yang diketuai oleh Menteri Pertanian, kemudian tahap berikutnya diturunkan kepada para Gubernur sebagai ketua dari Badan Pembina BIMAS tingkat I/provinsi berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian, dilanjutkan kembali kepada para Bupati selaku ketua Badan Pelaksana BIMAS tingkat II/kabupaten berdasarkan SK Gubernur, sedangkan tingkat Kecamatan dan Desa diketuai oleh Camat berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh Bupati untuk melaksanakan program ini. dalam memperlancar implementasi program tersebut. Hal ini menunjukkan program TRI merupakan kebijakan ekonomi yang dibangun menggunakan jalur birokrasi pemerintah untuk mempermudah pengawasan (Bachrioktora, 2001).

Pelaksanaan TRI sangat bergantung dari SK yang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian yang setiap tahun dapat berubah isinya, karena setiap musim tanam diadakan rapat kerja nasional TRI yang memproyeksikan luas lahan dan kebutuhan produksi, besarnya paket kredit dan lain sebagainya. Atas dasar rapat kerja nasional TRI tersebut, Menteri Pertanian kemudian dapat mengatur program TRI untuk tahun selanjutnya (Sinar Harapan, 15 Mei 1975).

Penetapan Letak dan Luas Areal

Implementasi dari Inpres No. 9/1975 tanggal 22 April 1975 yaitu dimulainya Program Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI). Menurut laporan tahunan yang diterbitkan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Jember menyebutkan bahwa Unit Pelaksana Proyek Tebu Rakyat Intensifikasi (UPP-TRI) Jember pada musim tanam tahun 1983/1984 telah mengadakan penyuluhan tentang areal lahan pertanian untuk penanaman tebu selama masa TRI terhadap para petani selaku peserta TRI (UPP TRI Jember II, 1983).

Berkaitan dengan penetapan luas areal untuk Program TRI ini bupati memiliki peranan sebagai pihak yang berwenang dalam mengeluarkan SK yang berisi pemilihan dan penetapan

wilayah tertentu untuk dijadikan sebagai perkebunan sasaran Program TRI. Apabila surat permohonan telah disetujui dan bupati mengeluarkan SK, maka Pabrik Gula dapat menentukan wilayah yang akan digunakan sebagai lokasi sasaran kebun TRI dengan melakukan koordinasi terhadap camat ataupun kepala desa terkait. Setelah adanya kesepakatan barulah kemudian kepala desa melakukan pendataan yang berisi daftar nama pemilik tanah dan luas areal yang akan diberikan serta direkomendasikan ke pihak Pabrik Gula selaku pembimbing dari petani (Wawancara dengan Yuris).

Implementasi Penanaman Tebu

Penanaman tebu pada masa TRI dimulai dari bulan Mei hingga Oktober. Penyelenggaraan penanaman tebu pada bulan-bulan tersebut dilakukan di lahan sawah yang bergiliran dengan tanaman padi sebelumnya. Setelah panen padi, lahan sawah dikeringkan dan diolah untuk menanam tebu. Transisi dari tanaman padi dengan tanaman tebu pada lahan sawah ini memiliki fungsi untuk menjaga kesuburan tanah dan mengendalikan hama (Wawancara dengan Yuris).

Terdapat tiga jenis TRI yang diselenggarakan di lahan sawah ini yaitu, TRIS Paket A, Paket B, dan Paket C. Sedangkan, untuk TRI yang dilaksanakan di lahan tegalan masa tanamnya ditentukan oleh ketersediaan air. Oleh sebab itu terdapat beberapa ketentuan penanaman tebu di wilayah ini yaitu harus disesuaikan dengan jumlah debit air dan keberadaan irigasi di sekitar tegalan (Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan, 1996:1).

Wilayah UPP-TRI Jember II melaksanakan MTT 1984/1985 pada awal bulan Mei hingga Desember, jumlah penanaman terbanyak berada di bulan Juli dengan presentase sebanyak 25%, diikuti bulan Agustus sebesar 24% dan bulan September berjumlah 19%. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Penyebaran Luas Areal Berdasarkan Bulan Tanam

Bulan	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
Luas	42,2	321,3	623,1	565,6	404,5	455,7	34,8	10,6	2448,8
(%)	1	13	25	24	17	19	2	0,5	100

Sumber: Cabang Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Jember

Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Jember bekerja sama dengan Pabrik Gula dalam usaha untuk penyediaan dan penyaluran bibit TRI dengan cara melakukan pembinaan dan pengawasan guna menemukan jenis bibit yang sesuai dengan ekologi, jenis iklim, kondisi tanah, dan lokasi penanaman sehingga menghasilkan tanaman tebu dengan varietas unggul sesuai dengan ketentuan pokok Program TRI. Bibit yang digunakan pada wilayah TRI di Jember ini berasal dari KBD (Kebun Bibit Datar) yang dikelola untuk menyuplai bibit bagi kebun tebu giling/kebun produksi dengan memperhatikan umur bibit yaitu sekitar 6-9 bulan (UPP TRI Jember II, 1983).

Adapun beberapa jenis tebu yang ditanam di beberapa wilayah UPP-TRI Jember II antara lain:

Tabel 2. Jenis Varietas Tebu UPP-TRI Jember II pada MTT 1984/1985

No.	Varietas	Luas	Persentase
1.	BZ 132	1.077,1 Ha	44%
2.	BZ 148	563,2 Ha	23%

3.	PS 30	146,2 Ha	6%
4.	P4 41	514,2 Ha	21%
5.	PS 48	52,4 Ha	3%
6.	PS 49	10,5 Ha	0,5%
7.	PS 56	19,7 Ha	1%
8.	Varietas Luas	65,3 Ha	1%
Jumlah areal seluas		2.448,8 Ha	100%

Sumber: Cabang Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Jember

Budidaya tebu memiliki beberapa tahapan-tahapan yang bersumber pada siklus penanaman tebu dari fase pertumbuhan tanaman yang berbeda setelah penanaman awal. Setiap fase ini mendeskripsikan tingkatan pertumbuhan tebu setelah dilakukan pemangkasan atau panen dari tanaman sebelumnya, tetapi masih menggunakan bekas atau tunas yang tumbuh dari akar tanaman yang sama. Tahapan-tahapan tersebut biasa dikenal dengan tebu tanaman pertama, tebu tanaman kedua, dan tebu tanaman ketiga (Evizal, 2018).

PEMBAHASAN

Organisasi TRI dan Tata Kerja

Guna menyukseskan pelaksanaan Program TRI ini pemerintah pusat melalui SK. Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas No. 011/SK/MENTAN/BPB/3/1976 tentang Program Tebu Rakyat Intensifikasi Tanaman Tahun 1976/1977 mengutus beberapa pihak untuk berpartisipasi serta mengembangkan berbagai tugas yang berkaitan dengan petunjuk teknis pengawasan, regulasi dan koordinasi selama masa TRI. Adapun pihak-pihak yang terlibat antara lain Satuan Pelaksana Bimbingan Massal (Satpel Bimas) bertugas sebagai pengelola, Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai penyedia kredit, Koperasi Unit Desa (KUD) menjadi penyalur fasilitas produksi, pabrik gula sebagai mitra petani sekaligus memberikan bimbingan teknis terkait sistem penerapan TRI, dan petani menjadi peserta dalam Program TRI (Surat Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas, 1976).

1. Sistem Perkreditan

Sistem perkreditan yang diberlakukan di Kabupaten Jember yaitu melalui bank BRI yang ditujukan kepada KUD setempat. Setiap kecamatan umumnya mempunyai satu KUD yang berguna sebagai tempat pencairan kredit sekaligus bertugas sebagai perwakilan dari berbagai kelompok tani TRI dalam berkoordinasi mengenai penyediaan fasilitas produksi dengan pemerintah. Petani TRI menerima kredit dalam bentuk modal kerja. Kredit ini berbentuk bimbingan teknis, bibit dan pupuk tebu (Wawancara dengan Saptadi).

Faktor utama penunjang keberhasilan dalam pelaksanaan program TRI salah satunya adalah penyediaan paket kredit dari BRI yang diperuntukkan oleh petani. Para petani beranggapan bahwa kredit merupakan faktor penting dalam melaksanakan program TRI mengingat program tersebut memiliki tujuan untuk memanfaatkan lahan yang sudah ada dengan optimal tanpa harus memperluas lahan dan hal ini tentunya membutuhkan biaya untuk pembelian bibit, pupuk serta obat hama. Dapat disimpulkan bahwa ketertarikan petani dalam mengikuti program TRI ini selain agar dapat meningkatkan pendapatan juga dilatar belakangi oleh adanya penyediaan paket kredit yang akan diterima selama masa TRI (Setyawati, 1982).

Terkait dengan masalah kredit ini bagi pihak bank memang cukup sulit. Apabila mempermudah persyaratan dan pencairan akan menimbulkan risiko kredit macet yang tinggi dan penyimpangan. Sementara menawarkan dengan pola yang umum dan birokratis, menimbulkan keterlambatan pencairan dan mengganggu kelancaran aktivitas petani. Sehingga

hal ini upaya yang dilakukan oleh pabrik gula dalam mengatasi masalah penyaluran kredit yaitu memberi sebuah rekomendasi kepada petani peserta TRI apabila mereka ingin mengajukan kredit, diharapkan dengan cara ini dapat memberikan dampak yang positif terutama dalam mengurangi masalah kemacetan pengembalian kredit. Sebelumnya keterlibatan pabrik gula hanya terbatas pada penilaian teknis untuk memberikan rekomendasi layak tidaknya suatu lahan untuk ditanami tebu, dan melakukan verifikasi atas kebenaran informasi teknis yang berkaitan dengan lahan untuk ditanami tebu yang diajukan petani. Tanpa adanya rekomendasi dari pabrik gula, maka kredit tidak akan diberikan oleh pihak bank (Hamid, 1991).

Adapun pedoman paket kredit TRI yang diterapkan di kabupaten Jember mengikuti surat keputusan menteri pertanian yaitu untuk tebu rakyat penanaman pertama (Paket A) dianggarkan sebesar Rp. 350.000/ha, tebu tanaman keprasan (Paket B) sejumlah 250.000/ha serta penyediaan kredit untuk biaya insektisida sejumlah Rp. 20.000/ha (Surat Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas, 1976).

2. Sistem Tebang Angkut

Perolehan analisis kemasakan tebu yang dilakukan oleh FMPW dijadikan sebagai patokan dasar dalam menentukan waktu tebang. Tahap selanjutnya FMPW ditingkat kecamatan bekerja sama dengan FMGP untuk merancang sekaligus menetapkan jadwal tebang. Pembuatan jadwal tebang ini juga melibatkan wakil dari kelompok tani atau KUD yaitu K2P2G menjadi sebagai pengawas. K2P2G memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam proses menganalisis kematangan tebu di masing-masing pabrik gula. Pemilihan anggota K2P2G diutamakan kepada petugas KUD yang sudah mengikuti pelatihan rendemen yang diselenggarakan oleh P3GI (Siahaan, 1996).

Penerbitan jadwal tebang menandai dimulainya kegiatan penebangan di perkebunan tebu rakyat yang kemudian diangkut ke tempat timbangan pabrik gula setempat. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penebangan ini yaitu KUD, kelompok tani, serta pabrik gula. Dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: penebangan yang dilaksanakan oleh KUD mewajibkan kelompok tani untuk terlebih dahulu membuat surat kuasa kepada KUD. Sedangkan pihak kelompok tani diperbolehkan untuk melakukan tebang angkut secara mandiri dengan syarat membuat surat pernyataan yang ditujukan kepada pihak KUD, melampirkan dokumen rekomendasi dari pabrik gula serta wajib mematuhi aturan-aturan yang sesuai dengan program TRI (Cholid, 1987).

Terdapat dua metode yang digunakan oleh petani TRI pada saat melakukan penebangan yaitu, untuk tebu keprasan metode penebangannya dengan cara membongkar guludan terlebih dahulu hingga mencapai batas tanah waras. Sedangkan untuk tebu yang tidak dikepras guludan dibongkar dan seluruh batang dicabut dengan cara mendongkel menggunakan alat linggis, cangkul dan sabit. Guna memudahkan dalam proses pengangkutan, biasanya tebu yang telah ditebang kemudian dipilah lalu diikat hingga berjumlah kurang lebih 20 batang per ikat. Petani peserta TRI wajib menyerahkan seluruh hasil tebunya kepada pabrik gula selaku pembimbing dan mitra untuk selanjutnya dilakukan proses penggilingan (Baga, 1986).

UPP TRI Kabupaten Jember dalam penerapan tebang angkut MT 1984/1985 mendirikan sebuah tim koordinasi pada setiap bagian seperti tim koordinasi tebang muat dan angkut yang bertanggung jawab untuk mengkoordinir dan mengatur seluruh aktivitas penebangan dan pengangkutan dengan harapan dapat membantu kelancaran jalannya tebang angkut dan penggilingan selama masa TRI. Selain itu, pembentukan tim juga diadakan pada pelaksanaan timbangan dan rendemen yang berperan untuk mewakili keperluan para petani TRI dalam menetapkan produksi tebu, penentuan rendemen dan kristal/gula di PG Semboro.

3. Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan prosedur yang memuat segala aktivitas tentang pembagian hasil hablur antara petani selaku pemilik tebu dan peserta TRI dengan pabrik gula didasarkan pada kualitas rendemen tebu. Sistem bagi hasil ini diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor 04/SK/Mentan/Bimas/V/1992 yang berisi tentang penjelasan dan regulasi penerapan ketentuan bagi hasil tebu rakyat yang diolah pabrik gula. Sistem bagi hasil dalam pelaksanaan Program TRI mencerminkan terjalinnya kemitraan kerja usaha tani tebu dengan melakukan pembagian risiko atas hasil yang telah diperoleh petani/kelompok tani, KUD ataupun pabrik gula (Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan, 1996).

Pengaruh Pelaksanaan Program Tebu Rakyat Intensifikasi di Kabupaten Jember Tahun 1975-1998

1. Pengaruh dibidang Sosial

Program Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) merupakan sebuah kebijakan pemerintahan Orde Baru pada sektor agraria yang memiliki tujuan untuk meningkatkan penghasilan petani tebu, menambah produksi gula nasional, memperbaiki produktivitas tebu serta sebagai pengganti dari program sistem sewa tanah. Terdapat berbagai perubahan-perubahan pada kehidupan sosial ekonomi yang dirasakan oleh para petani. Dalam sistem TRI petani adalah elemen yang paling krusial, karena petani berperan sebagai produsen tebu utama yang dibimbing oleh Pabrik Gula (Tanama, 2017).

Terlaksananya program TRI membawa dampak positif bukan hanya kepada petani peserta TRI saja namun para buruh yang tidak berpartisipasi secara aktif juga turut merasakan dampaknya yaitu mendapatkan kesempatan lapangan kerja baru pada proses produksi tebu yang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah banyak. Hal ini berdampak terhadap pengurangan jumlah pengangguran di kalangan masyarakat, karena di dalam sistem TRI terdapat bagian-bagian seperti buruh angkut, penjaga lahan dan mandor tebang yang di mana tenaga kerja yang diperlukan tersebut biasanya memanfaatkan masyarakat sekitar yang tidak mengikuti program TRI (Wawancara dengan Nasir).

Program TRI yang melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya tentunya membawa pengaruh terhadap hubungan petani dengan pemerintah maupun pihak industri gula. Sistem yang terdapat dalam program TRI memerlukan koordinasi dengan berbagai lembaga pemerintah sehingga hal ini berkaitan dengan terjalinnya komunikasi antara pemerintah dengan petani selaku peserta TRI. Koordinasi tersebut di antaranya membahas tentang sistem penentuan letak luas areal, implementasi penanaman tebu, sistem perkreditan, sistem tebang angkut, dan sistem bagi hasil (Wawancara dengan Nasir). Terjalinya koordinasi yang terjadi selama pelaksanaan TRI diharapkan dapat membantu petani untuk menambah penghasilan, meningkatkan pengetahuan, memudahkan petani mendapatkan modal kerja, memperlancar pemasaran hasil panen untuk memaksimalkan hasil produksi tebu yang sesuai dengan tujuan utama program TRI (Anggreany, 2023).

Kenyataannya dalam melaksanakan sebuah program tentu tidak akan selalu berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Seiring banyaknya dukungan yang diperoleh dari berbagai pihak, maka akan disertai juga dengan berbagai kendala yang akan terjadi di lapangan. Adapun kendala-kendala yang berlangsung selama pelaksanaan program TRI antara lain yaitu pabrik gula mengalami kesulitan dalam menemukan petani yang secara sukarela bersedia mendaftarkan tanahnya untuk program TRI. Hal ini disebabkan lantaran adanya opini yang berkembang di kalangan para petani yang menyebutkan bahwa sebagian besar petani

masih meragukan keberhasilan dari program TRI, karena kebijakan ini dianggap cukup baru dan belum lama diresmikan sehingga akan menemui banyak sekali kendala yang kemudian dirasa tidak akan berpengaruh besar terhadap pendapatan petani serta tuntutan kebutuhan hidup selama menunggu hasil panen dan lahan yang dimiliki oleh petani relatif sempit maka bersumber dari pertimbangan-pertimbangan tersebut yang menyebabkan keengganan petani untuk berpartisipasi dalam program ini (Wawancara dengan Nasir).

2. Pengaruh di bidang Politik

Beberapa daerah yang mengikuti program TRI seperti Kabupaten Jember memiliki pengaruh yang dirasakan oleh masyarakat lokal seperti halnya di Desa Wonorejo Kecamatan Kencong yaitu meningkatnya lapangan kerja akibat adanya perluasan lahan tebu serta memerlukan buruh tambahan di bagian pengelolaan tanaman selama TRI (Wawancara dengan Arip).

Pengaruh implementasi program TRI yang dilaksanakan di Kabupaten Jember bukan hanya berdampak terhadap pendapatan petani saja namun berdampak juga terhadap perubahan pola petani yang awalnya bercorak subsisten tradisional menjadi petani komersial. Sejak berlangsungnya program TRI di Indonesia, termasuk di Kabupaten Jember telah terjadi perubahan pemanfaatan tanah pedesaan.

Perubahan penggunaan tanah pedesaan yakni berupa peralihan dari yang awalnya petani menanam jenis tanaman pangan seperti padi dan palawija yang hanya bertujuan untuk kelangsungan hidup masyarakat pedesaan kemudian beralih menjadi petani yang menanam jenis tanaman non pangan seperti tebu yang berorientasi komersial. Terjadinya peralihan dalam hal penggunaan tanah pedesaan tersebut menimbulkan adanya perubahan kondisi petani yang awalnya subsisten kemudian berganti menjadi petani komersial sejak berlakunya program TRI yang lebih menekankan pada penanaman komoditas tebu. Adanya peralihan status petani subsisten menjadi petani komersial menjadi penanda bahwa sedang terjadi proses transformasi pertanian (Ramadhan, 2021).

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentunya akan selalu memberikan dampak yang beragam bagi masyarakat. Dampak tersebut dapat berupa perubahan ke arah yang lebih positif ataupun negatif, keberhasilan pada suatu kebijakan pemerintah di beberapa daerah sangat dipengaruhi oleh banyak faktor tak terkecuali yaitu seperti program TRI. Meskipun dalam program TRI mempunyai tujuan utama yaitu untuk meningkatkan produktivitas gula serta untuk memperbaiki pendapatan dan kesejahteraan petani, namun dalam penerapannya program ini tentunya masih memiliki kekurangan yang menghambat keberhasilan dalam mencapai tujuan utama tersebut (Sudana, 2001).

Kuatnya faktor ekonomi sebagai salah satu faktor penentu dalam keikutsertaan para petani dalam program TRI dikarenakan pada dasarnya tujuan dari setiap petani dalam berusaha adalah untuk memperoleh pendapatan bersih sebesar mungkin dengan risiko kegagalan sekecil mungkin. Dengan hasil usahanya itu mereka berharap dapat meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya. Dalam usaha tani tebu rakyat, besarnya pendapatan tersebut akan mempengaruhi gairah mereka dalam mengusahakan tanaman tebu dan akan menentukan pula perkembangan industri gula nasional yang ditopang dari hasil tebu rakyat. Sebagai pelaku ekonomi, petani akan membandingkan besarnya pendapatan bukan saja dengan usaha tani yang sama pada masa sebelumnya, namun juga membandingkan dengan komoditi lain ataupun usaha lain yang menjadi alternatif.

KESIMPULAN

Pemberlakuan program TRI pada 22 April 1975 melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 merupakan langkah yang diambil pemerintah untuk menangani berbagai permasalahan industri gula nasional yang diakibatkan oleh lonjakan penduduk yang semakin meningkat. Karena kebijakan TRI ini dikembangkan di daerah Jawa maka Kabupaten Jember juga turut melaksanakan program ini sebagai bentuk kepatuhan terhadap kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah serta Kabupaten Jember yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sebagai wilayah sasaran TRI karna kondisi geografis dan kondisi sosialnya yang sesuai.

Pelaksanaan program TRI di Kabupaten Jember sudah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas No. 011/SK/MENTAN/BPB/3/1976 tentang Program Tebu Rakyat Intensifikasi Tanaman Tahun 1976/1977 yang memuat terkait pasal-pasal mengenai aturan-aturan TRI mulai dari proyeksi luas areal, pengairan, perkreditan, sarana produksi dan bibit, pengolahan dan bagi hasil, organisasi dan tata kerja dan lain sebagainya. Pelaksanaan Program TRI di Kabupaten Jember tidak dilakukan pada semua kawasan melainkan hanya terfokus pada wilayah Kabupaten Jember bagian selatan. Pertimbangan yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II mengenai kawasan Jember Selatan yang dipilih menjadi sasaran dalam pelaksanaan Program TRI ini yaitu berlandaskan pada data yang memuat potensi lahan pertanian, jumlah petani, serta jumlah kepala keluarga yang memadai.

Pelaksanaan program TRI di Kabupaten Jember membawa pengaruh yang dirasakan petani yaitu berdampak terhadap meningkatnya solidaritas antar petani, di mana sistem TRI secara tidak langsung memotivasi para petani agar dapat bekerja secara kolektif terutama dalam hal pengelolaan lahan, pemeliharaan tebu serta penyaluran hasil panen. Selain itu terdapat pengaruh di bidang ekonomi yang dirasakan oleh petani selama mengikuti program TRI seperti meningkatkan lapangan kerja akibat adanya perluasan lahan tebu serta memerlukan buruh tambahan di bagian pengelolaan tanaman selama TRI. Kuatnya faktor ekonomi sebagai salah satu faktor penentu dalam keikutsertaan para petani dalam program TRI dikarenakan pada dasarnya tujuan dari setiap petani dalam berusaha adalah untuk memperoleh pendapatan bersih sebesar mungkin dengan risiko kegagalan sekecil mungkin.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Akhmad Ryan Pratama, S.Hum., M.A dan Bapak Robit Nurul Jamil, M.Pd selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan berupa saran-saran yang membangun. Terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan motivasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, B. (2022). Perkembangan Industri Pabrik Gula Lestari di Nganjuk Pada Tahun 1910-1929. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*. 13(1): 1-8.
- Anggreany, S. (2023). Peran Jaringan Komunikasi Sebagai Elemen Penting Dalam Pengembangan Korporasi Petani di Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. 41(2). 119-133.
- Aprianto, C. T. (2016). Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan Partisipasi Politik, Klaim, dan Konflik Agraria di Jember. Yogyakarta: STPN Press.

- Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Inventaris Arsip Kementrian Pertanian RI (1948) 1950-2000, Nomor Klasifikasi 2825, Tentang Surat Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas, Nomor 001/SK/MENTAN/BPB/3/1976, Program Tebu Rakyat Intensifikasi Tanaman Tahun 1976/1977.
- Bachrioktora, Y. (2001). Kaum Tani dan Budidaya Tanaman Tebu di Jawa Masa Orde Baru (1975-1995). *Skripsi*. Depok: Universitas Indonesia.
- Baga, M. L. (1986). Dampak Pelaksanaan Program Tebu Rakyat Intensifikasi Terhadap Tingkat Produksi dan Pembiayaan Pabrik Gula Tersana Baru PTP XIV (Persero) Cirebon. *Skripsi*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Cholid, M. (1987). Pengelolaan Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) di Wilayah Kerja PG. Toelangan. *Skripsi*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, Surat Keputusan Dirjen Perkebunan Nomor 113/RC.220/SK/DJ.BUN/12/96 Tentang Petunjuk Teknis Program Bimas Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI).
- Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember. 1983. Laporan Tahunan Realisasi dan Evaluasi Program TRI MTT 1983/1984.
- Evizal, R. (2018). Pengelolaan Perkebunan Tebu. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Fauzi, I. 2015. Tebu Rakyat Intensifikasi di PG. Poerwodadi Magetan 1975-1980. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Hamid, S. (1994). Beberapa Permasalahan Tebu Rakyat Intensifikasi dan Industri Gula Indonesia. *Economic Journal of Emerging Markets*. 3(2): 59-67.
- <https://jatimprov.go.id/profile> diakses pada tanggal 06 Agustus 2024 Pukul 14.03 WIB.
- Masluchah, L. (2014). Program TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi) Di Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto 1975-1980. *Jurnal Avatara*. 2(3): 120-125.
- Masyhuri, H. I. (2017). Impor Gula Indonesia dan Faktor-Faktor Penentunya. *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Mubyarto, D. (1991). Gula: Kajian Sosial Ekonomi. Yogyakarta: Aditya Media.
- Mubyarto. (1982). Masalah Industri Gula Indonesia. Yogyakarta: BPFE.
- Nawiyanto. (2018). Terbentuknya Ekonomi Perkebunan di Kawasan Jember. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Prima, D. (2014). Korporatisme Pedesaan Orde Baru: Program Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) di Wilayah Kerja Pabrik Gula Mojo Sragen 1975-1998. *Jurnal Lembaran Sejarah*. 11(2): 137-150.

- Ramadhan, S. A. (2021). Gula: Program Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) 1975 dan Pengaruhnya Terhadap Petani Tebu. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*. 9(1): 55-62.
- Safitri, A. A. (2018). Pelaksanaan Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) di Kabupaten Brebes: Studi Kasus Pabrik Gula Banjarnegara Tahun 1983-1992. *Jurnal Prodi Ilmu Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta*. 3(5): 613-627.
- Setyawati, S. A. (1982). Pelaksanaan Program Tebu Rakyat Intensifikasi Dengan Berbagai Masalah dan Kemungkinan Pengembangannya di PG Purwodadi PTP XX Madiun. *Skripsi*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Siahaan, H. (1996). Pembangkangan Terselubung Petani Dalam Program Tebu Rakyat Intensifikasi Sebagai Upaya Mempertahankan Subsistensi. *Disertasi*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Sinar Harapan*, 15 Mei 1975.
- Sudana, W. (2001). Keragaan Tebu Rakyat Di Jawa Timur Pada Akhir Berlakunya Inpres 9/1975 Serta Implikasinya Terhadap Industri Gula Nasional. *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi*. Vol. 19(1). 43-45.
- Tanama, J. (2017). Pelaksanaan Inpres No. 9/1975 (TRI) di PG Kremboong Kabupaten Sidoarjo 1975-1991. *Jurnal Avatara*. 5(3): 1013-1026.
- Wawancara Bapak Arip (Petani TRI) 20 Desember 2024, Pukul 16.00-17.00 WIB.
- Wawancara Bapak Nasir. (Petani TRI) 15 Desember 2024, Pukul 18.00-19.30 WIB.
- Wawancara Bapak Saptadi. (Pensiunan Manajer Administrasi Keuangan dan Umum PG Semboro dan Mantan Ketua APTR Periode 2001-2006) 02 Oktober 2024, Pukul 08.00-10.00 WIB.
- Wawancara Bapak Yuris. (Mantan pekerja di PUSKUD Jawa Timur Cabang Jember dan petani tebu sejak tahun 1980-sekarang) 01 Oktober 2024, Pukul 10.00-12.00 WIB.
- Winarni, R., et al. (2021). Perkembangan Perkebunan Partikelir di Jember (1850-an – 1930-an). *Historia*. 4(1): 437-460.